

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SIAK JAYA

Melindawati¹, Ade Chandra²

STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Email: melindawati932@gmail.com

Email: adec152@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Siak Jaya. Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan guna melindungi kepentingan perusahaan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. BPRS Siak Jaya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada 6 prinsip, yaitu: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, keadilan, dan integritas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian perpustakaan dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan bagaimana implementasi tata kelola perusahaan yang baik di BPRS Siak Jaya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik di BPRS Siak Jaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan bank dan perusahaan.

Kata Kunci: *Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of Good Corporate Governance at Islamic Rural Bank (BPRS) Siak Jaya. Good Corporate Governance is a healthy corporate principle that needs to be implemented in the management of the company which is carried out to protect the interests of the company in order to achieve the company's goals and objectives. BPRS Siak Jaya in implementing good corporate governance is guided by 6 principles, namely: openness, accountability, responsibility, professionalism, fairness a. This type of research is qualitative research and library research using a descriptive approach. In this study the authors describe how the implementation of good corporate governance at the BPRS Siak Jaya. Methods of data collection use interviews, observation and documentation. Based on the results of this study, it could be concluded that the implementation of good corporate governance at the BPRS Siak Jaya has been carried out properly based on bank and company's regulations.

Keywords: *Good Corporate Governance (GCG), Islamic Rural Bank (BPRS)*

PENDAHULUAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat, maka dibutuhkan tata kelola yang baik yang sudah menjadi keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang mewajibkan BPRS menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris yaitu *good* yang artinya baik *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* berarti pengaturan. Secara umum istilah *good corporate governance* diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Istilah ini dalam dunia perbankan diartikan dengan tata kelola bank yang baik (Hamdani, 2019). Dalam menjalankan suatu bisnis lembaga keuangan tidak lepas dari pelaksanaan tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem, hak proses dan kontrol secara keseluruhan yang diterapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua *stakeholder* (Rusdiana & Saptaji, 2018).

Penerapan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu dilaksanakan karena resiko dan tantangan yang dihadapi bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak yang kompleks. Secara internal Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara optimal (Ikit, 2018).

Manajemen perusahaan harus terus berkomitmen untuk melaksanakan perusahaan dengan berpedoman dengan prinsip-prinsip GCG sehingga diharapkan perusahaan bisa berkembang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya (Yunita & Anwar, 2020). Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain:

- a. *Fairness* (kewajaran prosedur) yaitu suatu prinsip dalam birokrasi pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk kewajaran prosedur, artinya birokrasi yang tepat dan berdaya guna. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan / memyamkan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsi keterbukaan.
- b. *Transparency* (keterbukaan) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketertnuan rahasia Bank sesuai Undang - Undang yang berlaku.
- c. *Accountability* (pertanggungjawaban kinerja pemerintahan terhadap publik). Kesediaan secara ikhlas untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tindakan dari aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertangung jawaban organ Bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif. Bank memiliki kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran - ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan Strategi Ban sebagai pencerminan akutabilitas Bank. Dalam hubungan Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing - masing organisasi yang selaras dengan visi`132, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terhadapnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
- d. *Responsibility* yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Penerapan dari prinsip *responsibility*/ pertanggungjawaban adalah dengan memperhatikan keselamatan serta kesehatan para mitra maupun nasabahnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan mentati peraturan perundang-undangan.

- e. *Independency* (Independensi) bahwa manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (*independent*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.

Lembaga bisnis syariah sebagai tata kelola organisasi yang baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip umum terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independe dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dasar hukum pelaksanaan *Good Corporate Governance* terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan OJK nomor 30/SEOJK.03/2019 Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

Tata kelola perusahaan yang baik akan berdampak pada peningkatan kinerja, baik dari segi produktivitas maupun efisiensi di dalam perusahaan dan juga akan menjadi daya tarik bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk berinvestasi dan mempertahankan investasi dan kerjasama. Dengan adanya kerentanan perbankan, peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan bentuk peningkatan daya saing yang sangat penting. Melalui penerapan *Good Corporate Governance*, diharapkan perbankan Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan, baik pada masa krisis maupun non-krisis, di tingkat regional maupun internasional (Tobing et al., 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya sesuai amanah Peraturan OJK Nomor: 24/POJK.03/2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) karena dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kepada objek yang akan diteliti dengan tujuan mendapatkan data yang relevan. Sifat penelitian menggunakan metode kualitatif karena bersifat deskriptif analitik. Menurut Siyoto & Sodik informasi merupakan unit data yang direkam media yang akan membedakan dengan informasi lain. Data diperoleh melalui wawancara secara langsung pada Adi Wandra yang merupakan Direktur Utama BPRS Siak Jaya.

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Sujarweni, 2015). Metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik.

Deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Arikunto, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian . Laporan Penerapan *Good Corporate Governance* terlihat pada tabel berikut ini :

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

No	Pelaksana Tugas dan Tanggung jawab
I	1. Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab: a. Melaksanakan manajemn BPRS Syariah Siak Jaya meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaaa BPRS Siak Jaya c. Mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan d. Menjaga keseimbangan likuiditas e. Bersama Komite Pembiayaan membuat keputusan pembiayaan f. Mereview dokumen pembiayaan yang diajukan marketing g. Menyusun dan merencanakan rencana bisnis bank h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan i. Menerapkan tata kelola BPRS Siak Jaya j. Menindaklanjuti temuan audit k. Memastikan terpenuhinya kebutuhan SDM l. Menyediakan informasi akurat kepada Dewan Pengawas m. Memastikan semua yang dilakukan telah terpenhi aturan OJK
II	2. Direktur Operasional Tugas dan Tanggung Jawab: a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan BPRS Siak Jaya b. Menetapkan strategi dan rencana kerja c. Merekomendasikan penyelesaian pembiayaan bermسالah d. Merumuskan anggaran perusahaan e. Bertanggung jawaba secara umum kepada Dewan Pengawas f. Memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat keputusan g. Melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan tugas h. Menetapkan Langkah yang diperlukan i. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada unit kerja j. Mengungkapkan kebijakan BPRS yang bersifat strategis k. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan l. Meminimalisir resiko m. Melaksana fungsi kepatuhan n. Menjalankan tugas yang diberikan Direktur Utama
III	3. Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab a. Sebagai Pusat komunikasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham b. Memastikan Dewan Komisaris mendapatkan informasi dan meminta persetujuan yang relevan c. Bertanggung jawan memimpin Dewan Komisaris d. Bertanggung jawab menentukan agenda rapat dan memimpin rapat e. Komisaris menentukan keadaan mendesak f. Mengundang anggota komisaris menghadiri rapat dewan komisaris g. Memastikan agar para komisaris mendapatkan informasiakurat h. Membina hubungan konstruktif i. Mengembangkan standard <i>Good Coorporate Governance</i> yang terbaik pada bank
IV	4. Komisaris Independen Tugas dan Tanggung Jawab : a. Melaksanakan pengawasan terhadap Direksi b. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit c. Bersama - sama dengan komisaris utama mereview menyetujui rencana bisnis d. Bersama - sama dengan komisaris utama mereview dan meyetujui laporan tahunan
V	5. Ketua Dewan Pengawas Syariah Tugas dan Tanggung Jawab : a. Mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi b. Melaporkan hasil pengawasan kepada PSP c. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas paling sedikit 1 x 3 bulan d. Menyelenggarakan rapat dengan agenda rapat encana bisnis bank

	e. Membuat dan memelihara risalah rapat f. Memastikan direksi menindaklanjuti hasil audit g. Merumuskan konsep rekomendasi kepada direksi h. Menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugas
VI	6. Anggota Dewan Pengawas Syariah Tugas dan Tanggung Jawab : - Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman produk - Mengawasi proses pengembangan produk baru - Meminta fatwa kepada Dewan Pengawas Syariah nasional - Majelis Ulama Indonesia - Melakukan review secara berkala atas pemecahan prinsip syariah - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah - Melakukan Pengawasan terhadap BPRS Siak Jaya - Bersama - sama dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	Nihil			
2	Komite Pemantauan Resiko	Nihil			
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	Nihil			

C. Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite Audit	Komite Pemantauan Resiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Pihak Independen
1	Nihil					

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Nihil				

E. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lainnya	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

I. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada BPR/ BPRS lainnya

No.	Dewan Komisaris	Nama BPR/BPRS / Perusahaan Lainnya	Jabatan
1	Komisaris Independen	BPRS Hasanah	Komisaris Utama

J. Rangkap Jabatan Anggota Dewan pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Lainnya

No.	Dewan Pengawas Syariah	Nama BPR/BPRS / Perusahaan Lainnya	Jabatan
1	Nihil	Nihil	Nihil

Adapun implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Pelaksanaan prinsip *transparency* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya sebagai berikut:

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang telah memberikan informasi tentang kondisi keuangan bank dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya memberikan informasi tentang kondisi non keuangan, seperti:
 - 1) Penyampaian informasi mengenai produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya melalui brosur, mediasosial dan penyampaian edukasi kepada masyarakat baik di sekolah, pertemuan, maupun pengajian. Dengan adanya kegiatan tersebut inklusi keuangan harapannya akses terhadap produk-produk perbankan dapat lebih dinikmati oleh masyarakat luas.
 - 2) Penyampaian informasi yang jelas terkait bagi hasil dan bonus kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan ketika nasabah pertamakali membuat kesepakatan dengan pihak bank.
 - 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya secara transparan menyampaikan kepada nasabah pembiayaan terkait plafond, biaya, besar kecilnya angsuran, jaminan yang mengcover, margin, dan resiko yang ditimbulkan. Semua informasi disampaikan dengan jelas dan benar oleh pihak marketing.
 - 4) Pengambilan keputusan oleh manajemen sudah dilakukan secara terbuka, yaitu penyampaian informasi dari pimpinan kepada para karyawan dilakukan pada saat *breafing* pagi dan *meeting*.

2. Accountability

Pelaksanaan prinsip *Accountability* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya:

- a. Dalam pembentukan struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah dilaksanakan dengan jelas, sesuai tugas dan wewenang masing-masing organ.
- b. Selalu mengingatkan kepada nasabah pembiayaan ketika sudah jatuh tempo. Ketika

nasabah sudah tidak mampu membayar/kredit macet maka dari pihak marketing melakukan penanganan eksekusi agunan dengan mengedepankan musyawarah.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya melayani pengaduan nasabah/*handling complaint* dengan efektif di kantor Bank.

3. *Responsibility*

Pelaksanaan prinsip *Responsibility* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya antara lain: BPRS Siak Jaya bekerjasama dengan Lembaga Asuransi untuk menjamin para nasabah maupun karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya .

4. *Fairness*

Pelaksanaan prinsip *Fairness* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya antarlain:

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya melakukan pelayanan kepada nasabah dengan baik agar nasabah nyaman dengan pelayanan yang diberikan.
- b. Informasi data bagi nasabah dapat dipenuhi secara cepat
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya memelihara data informasi nasabah secara memadai

5. *Independency*

Pelaksanaan prinsip *Independency* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya antarlain:

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya dalam melaksanakan kegiatannya tidak adanya pihak yang melakukan intervensi dan dominasi *stakeholder*, sehingga tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam pengelolaan manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b. Pelaksanaan prinsip *independency* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- c. Dalam rangka mendukung independensi dalam aktivitas operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya memiliki 2 anggota Dewan Komisaris.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan lain.
- e. Seluruh anggota komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan/keluarga dengan anggota Direksi atau pemegang saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- f. Seluruh anggota dewan komisaris juga telah memenuhi ketentuan pelaksanaan integritas sehingga kepentingan bank dapat dilaksanakan dengan baik.

Penerapan *Good Corporate Governance* telah diterapkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya yaitu dari prinsip akuntabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya jumlah DPS ada 2 (dua). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bab IV Pasal 40 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota DPS. Jumlah DPS pada bank sangat mempengaruhi peran dan tugasnya. Peran DPS sangat penting dalam mengawasi operasional maupun bisnis bank syariah. Untuk penyimpangan yang terjadi pada BPRS Siak Jaya sudah dipastikan ada, karena BPRS merupakan perusahaan dan secepat mungkin diperbaiki, seperti resiko operasional yaitu

dari sisi teknis ketika terjadi gangguan sistem. Pihak audit mengupayakan secepat mungkin menyelesaikan masalah tersebut dan memperbaiki secepat mungkin

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Good Corporate Governance* yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Siak Jaya secara umum cukup baik dengan memenuhi prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*) dan memenuhi peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2018 Bab IV tentang Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka cipta.
- Arif, Z. (2019). Optimalisasi Peluang Dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 89-99.
- Dewi, Z. R. (2022). Analisis Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia Dan Bank Negara Indonesia Syariah. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(2), 180-190.
- Hamdani. (2019). *Konsep Corporate Governance Syariah dalam Etika antara Shareholders vs Stakeholders*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muhajir, Fathudin, & Amat Ulya Inayah. (2021). Faktor Pelayanan, Promosi Dan Reputasi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Magelang Tahun 2019. *AL-BAYAN: ISLAMIC LAW AND ECONOMICS*, 1(2), 32-48.
- Muhajir, Fathudin, & Listyadi, H. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, 4(2), 10-23. Muhajir, A. F. A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah.
- Ningrum, I. F. (2018). *Implementasi akad wadiah pada tabungan kurban di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah Gresik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Putri, M. P. (2020). *Implementasi Prinsip Sharia Corporate Governance Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Rusdiana, A., & Saptaji, A. (2018). *Auditing Syari'ah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Pustaka Setia.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustakabarupress.
- Susyanti, J. (2016). Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. In *Malang: Empat Dua*.